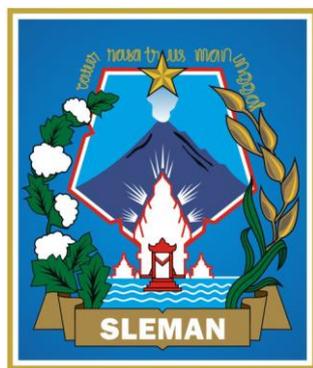


# **PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEDESAAN KABUPATEN SLEMAN**



YOGYAKARTA 2019

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun bangsa Indonesia, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah Pembangunan infrastruktur. Sehingga pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia atas dasar kepentingan masyarakat dengan tujuan hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Indikator kesejahteraan suatu kawasan dapat terlihat dari infrastruktur yang terjadi di dalam suatu kawasan tersebut. Keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti halnya jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sarana perlistrikan, sarana irigasi dan sarana transportasi sering dikaitkan sebagai pemicu perkembangan pembangunan di berbagai bidang pada suatu kawasan. Sehingga, Percepatan pembangunan infrastruktur semakin penting untuk lebih diperhatikan, sebagai contoh infrastruktur jalan yang dapat berperan sebagai sarana pembuka keterisolasian suatu desa dengan perkotaan sehingga dengan adanya infrastruktur jalan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Pembangunan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Sehingga, keberadaan infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam

mendukung kegiatan di berbagai bidang. Infrastruktur memiliki korelasi yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut terlihat dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi baik memiliki tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pula.

infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu pembangunan infrastruktur lebih di fokuskan khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh beberapa faktor, yaitu terjadinya kesulitan dimasyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti pada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan ataupun dalam tahapan pelaporan. Dengan kondisi yang seperti ini menyebabkan infrastruktur yang akan terbangun menyebabkan fungsinya menjadi tidak efektif dan efisien, yang pada akhirnya infrastruktur yang telah terbangun tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Berdasarkan pemaparan di atas, akan dilakukan kajian mengenai Pembangunan Barang dan Jasa di Desa, sehingga dengan adanya kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kemajuan yang lebih baik dalam pembangunan barang dan jasa di desa khususnya desa-desa di kabupaten Sleman.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program pembangunan infrastruktur pedesaan oleh aparatur desa dan masyarakat ?
2. Bagaimanakah penyelesaian pembuatan pelaporan pembangunan desa dengan baik, mudah dipahami dan benar ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Memberikan saran solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program pembangunan infrastruktur pedesaan oleh aparatur desa dan masyarakat.
2. Membantu penyelesaian pembuatan laporan pembangunan desa menggunakan program komputer sederhana, dengan harapan dapat mempermudah dalam pembuatan laporan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian bagi studi Administrasi Daerah, khususnya mengenai implementasi kebijakan.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi aparatur desa dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur pedesaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk menganalisis pengelolaan keuangan lembaga publik, diantaranya Sumiati (2015), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas Alokasi Dana Desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Karena tidak mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Pengawasan secara periodik dan kontinyu oleh kepala desa terhadap pengelolaan dana ADD belum maksimal dilaksanakan.

Dewanti dkk., (2016), meneliti tentang “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 tahun 2007 banyak

sekali ketidak sesuaiannya. tingkat kesesuaian mulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan APBDes sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDes sebesar 50%. Untuk format dokumen APBDes juga memiliki ketidak sesuaian dengan Permendagri No. 37 tahun 2007, memiliki kesesuaian dari pengelompokan akun-akunnya saja, sedangkan untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007.

Putra dkk., (2013), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”. hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya.

Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Dalam penganggaran ADD terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Malang No. 18 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. dimana dana ADD untuk operasional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam RPD untuk operasional pemerintah desa akan tetapi justru dimasukkan pada RPD untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Thomas (2013), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa sebang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebang.

Karimah dkk., (2014), meneliti tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya, beberapa *stakeholders* juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat

bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Definisi Pengelolaan**

Menurut Thantawi (2013) Pengelolaan adalah suatu proses/kegiatan/usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang-orang lain.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008).

### **2.2.2 Definisi Keuangan Desa**

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 10 bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD), adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### **2.2.3 Definisi Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat 6, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.

Selanjutnya, pada Bab II Pasal 2 Ayat 1 dan 2, tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Maka dari itu dalam mengelola keuangan pemerintah harus menerapkan asas tersebut dengan sungguh-sungguh karena hal tersebut merupakan amanat.

### **2.2.4 Struktur Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri No. 113 tahun 2014 Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan, untuk:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan APBDes.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa,
- b. Bendahara Desa, dan
- c. Kepala Seksi.

PTPKD sebagaimana disebut dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Bab III Pasal 5, Pasal 6, Dan Pasal 7 mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. tugas dari Sekretaris Desa yaitu:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
  - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
  - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.

- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
  - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
2. Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
3. Kepala Seksi mempunyai tugas:
    - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
    - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes.
    - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
    - d. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan.
    - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
    - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

### **2.3 Definisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Ulum (2008:98) Anggaran Publik merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan

dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang.

Fungsi Anggaran menurut Bastian (2010:191-192) yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan proses rencana kerja.
2. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan serta bawahan.
3. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
4. Anggaran sebagai alat motivasi dalam pencapaian visi organisasi.
5. Anggaran merupakan instrumen politik.
6. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal, dan
7. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja setiap pelaksanaan kegiatan.

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Ayat 8 bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. lebih lanjut dalam Bab IV Pasal 1 dijelaskan bahwa APBDes terdiri atas:

- a. Pendapatan desa, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- b. Belanja desa, diklasifikasi menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- c. Pembiayaan desa, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

#### **a. Pendapatan Desa**

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- 1) Pendapatan desa, terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan lain-lain.
- 2) Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- 3) Hasil usaha desa, antara lain:
  - a. Hasil bumdesa;
  - b. Tanah kas desa.
- 4) Hasil aset, antara lain:
  - a. Tambatan perahu;
  - b. Pasar desa;
  - c. Tempat pemandian umum;
  - d. Jaringan irigasi.
- 5) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- 6) Kelompok transfer, terdiri atas jenis:
  - a. Dana Desa;

- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
  - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- 7) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis:
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - b. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah.
- 8) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain:
- a. Hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
  - b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### **b. Belanja Desa**

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

- 1) Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:
- a) Penyelenggaraan pemerintah desa;
  - b) Pelaksanaan pembangunan desa;
  - c) Pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d) Pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e) Belanja tak terduga.

2) Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa. Kegiatan ini terdiri atas jenis belanja:

- a) Pegawai;
- b) Barang dan jasa; dan
- c) Modal.

3) Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. belanja pegawai dianggarkan dalam:

- a) Kelompok penyelenggaraan pemerintah desa;
- b) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
- c) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

4) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.

Belanja barang/jasa antara lain:

- a) Alat tulis kantor;
- b) Benda pos;
- c) Bahan/material;
- d) Pemeliharaan;
- e) Cetak/penggandaan;
- f) Sewa kantor desa;
- g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h) Makanan dan minuman rapat;
- i) Pakaian dinas dan atributnya;
- j) Perjalanan dinas;
- k) Upah kerja;
- l) Honorarium narasumber/ahli;
- m) Operasional pemerintah desa;
- n) Operasional badan permusyawaratan desa;

- o) Insentif RT/RW;
- p) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

### **c. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri atas:

1. Pembiayaan desa, terdiri atas kelompok:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
2. Penerimaan pembiayaan, mencakup:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
3. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal desa.

## **2.4 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014**

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan dalam Bab V Pasal 20 s/d 42 bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. dimana 5 (lima) kegiatan tersebut harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. berikut penjelasan kegiatan dalam pengelolaan

keuangan desa:

#### **2.4.1 Perencanaan**

Pada Pasal 20 Permendagri No. 113 tahun 2014, tentang Perencanaan mengatur bahwa:

- a. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

#### **2.4.2 Pelaksanaan**

Pada Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 24, tentang Pelaksanaan yang mengatur bahwa:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dilanjutkan pada pasal 25, yang mengatur bahwa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pengutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

Pada pasal 26 Permendagri No. 113 tahun 2014, mengatur bahwa :

- 1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan baban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak

termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.

- 3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pada pasal 27 Permendagri No. 113 tahun 2014, mengatur bahwa:

- 1) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

#### **2.4.3 Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. hal ini tertera dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 35, yang mengatur bahwa:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **2.4.4 Pelaporan**

Pada saat Pelaporan, Pemerintah Desa wajib mematuhi Pasal 37, yang mengatur bahwa:

- a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:
  - 1. Laporan semester pertama.
  - 2. Laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berupa laporan realisasi APBDes.
- c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **2.4.5 Pertanggungjawaban**

Saat pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Desa harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 38, yang mengatur bahwa:

- a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
  - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
  - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40, bahwa:

- 1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud, antara lain:
  - a. Papan pengumuman
  - b. Radio komunitas, dan
  - c. Media informasi.
- 3) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan pada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- 4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **BAB III**

### **HASIL KAJIAN**

#### **3.1 Umum**

Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui hambatan atau permasalahan kemudian mengusulkan solusi kepada pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hal pengadaan barang dan jasa di desa.

Pengadaan barang dan jasa di desa yang dikelola dengan baik, khususnya pada pembangunan desa sangat penting karena desa menjadi berkembang dan lebih maju sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan kawasan perkotaan. Permasalahan dalam hal pengelolaan barang dan jasa di desa yang menjadi sampel kajian masih fokus pada program pembangunan desa (pembangunan infrastruktur) dikarenakan program pembangunan infrastruktur mengalokasikan Jumlah anggaran dana desa sekitar 70%. Program infrastruktur yang banyak dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu program pembuatan saluran irigasi, saluran drainase (gorong-gorong), pengerasan jalan kampung, gudang, penerangan jalan kampung, pembangunan instalasi air bersih, dll. Selebihnya, sekitar 30% dari dana Desa dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat antara lain seperti program bantuan permodalan bagi BUMDes, dana operasional PKK dan Karang Taruna, santunan untuk lansia, dan bantuan beasiswa.

#### **3.1 Kendala dan Solusi Pengelolaan Barang dan Jasa Desa**

Kendala yang selama ini dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program Dana Desa adalah keterlambatan pelaporan pekerjaan

dikarenakan pemerintah desa mengalami kesulitan untuk mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur. Sehingga, dampak dari kasus tersebut adalah terjadi adanya temuan dari tim auditor karena ketidaksesuaiannya antara pekerjaan dilapangan dengan laporan pertanggung jawaban yang dibuat.

Pengerjaan program pembangunan infrastruktur terkadang juga mengalami kendala karena terjadinya kesulitan dalam menentukan kebutuhan jumlah pekerja dan bahan material. Hal ini terjadi karena apabila proyek dilaksanakan secara swadaya terkadang dapat terjadi melonjaknya anggaran yang dibutuhkan akibat ketidaksesuaiannya antar jumlah pekerja dengan volume yang dikerjakan, misal pekerjaan yang seharusnya hanya dikerjakan satu tukang namun dikerjakan dua atau tiga tukang begitu juga sebaliknya terjadi terlambatnya waktu pengerjaan proyek dikarenakan kurangnya jumlah pekerja. Selain itu, banyaknya sisa bahan material karena kesalahan dalam menghitung kebutuhan material.

Terkait dengan beberapa data dan kendala yang ditemukan dalam kajian maka tim pengkaji merekomendasikan beberapa hal, yaitu pertama, Pemerintah Kabupaten perlu segera menerbitkan regulasi tentang kewenangan desa dan regulasi tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Regulasi tentang kewenangan desa sangat diperlukan agar pemerintah desa benar-benar mengetahui kewenangan yang dimiliki sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten.

Sedangkan regulasi tentang perencanaan dan penganggaran diperlukan agar desa mampu melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara baik dan benar sehingga program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kedua, dalam penggunaan Dana Desa perlu adanya penambahan porsi anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu diperlukan agar program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bisa lebih bermanfaat bagi warga masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber daya manusia warga masyarakat yang masuk dalam kategori kelompok rentan, yaitu warga miskin, difabel, perempuan dan minoritas.

Ketiga, perlu ada upaya untuk menjamin ketepatan waktu pelaksanaan transfer Dana Desa ke pemerintah desa. Ketepatan waktu penyaluran dana desa akan menyebabkan pemerintah desa memiliki waktu yang cukup untuk mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Apabila pemerintah desa dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama tepat waktu, maka penyaluran dana desa tahap kedua juga akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Hal itu akan menyebabkan pemerintah desa tidak perlu mengambil talangan/hutang untuk melaksanakan program pembangunan tahap kedua.

Keempat, perlu ada penyederhanaan sistem pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa tanpa mengurangi

akuntabilitas laporan, sehingga memudahkan pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

Selama ini pemerintah desa sering mengalami kesulitan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa karena sistem pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dianggap terlalu rumit.

Munculnya persoalan terkait hukum seperti kompleksnya regulasi penggunaan dana desa, literasi hukum pengelola dana desa yang minimal serta praktik pengelolaan yang mengabaikan aspek legalitas, menjadi permasalahan yang sering terjadi.

Solusi alternatif dari permasalahan tersebut bisa diatasi dengan beragam cara, antara lain optimalisasi sumber daya pemerintah desa, membuat suatu sistem program komputer sederhana yang dapat digunakan untuk mempermudah pembuatan laporan pertanggungjawaban, seperti dalam kajian ini.

Dengan adanya perbaikan dalam pengelolaan dana desa maka diharapkan kedepan pengelolaan dana desa bisa lebih efektif untuk mencapai tujuan yaitu terjadinya percepatan pembangunan desa sehingga desa mampu mengejar ketertinggalan dengan kawasan perkotaan.

Terkait dengan dukungan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, sebagian besar pemerintah Kabupaten telah melaksanakan kebijakan dalam rangka memberi dukungan serta pengawasan agar pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa agar bisa berjalan efektif dan tidak

mengalami bias/penyimpangan. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang Dana Desa baik di forum resmi maupun tidak resmi, dan kegiatan bimbingan teknis tentang aturan (regulasi) dan tatacara (teknis) pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, jajaran birokrasi di tingkat kecamatan sebagai representasi pemerintah kabupaten yang berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat desa secara rutin melakukan pendampingan terkait dengan pengelolaan dana desa kepada pemerintah desa. Dalam setiap rapat koordinasi di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh semua kepala desa, para birokrat di tingkat kecamatan juga selalu memberikan arahan dan petunjuk bagi para kepala desa tentang tata cara pengelolaan Dana Desa yang baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Terkait dengan kesiapan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, sebagian besar desa yang menjadi sampel penelitian telah melakukan perencanaan program pembangunan secara partisipatif. Pelaksanaan program pembangunan desa juga telah melibatkan warga masyarakat desa, baik sebagai anggota tim pelaksana kegiatan (TPK) maupun sebagai pekerja proyek. Sedangkan dalam aspek pengawasan, selain anggota BPD warga masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan program.

Sebagian besar program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan aspirasi dari warga masyarakat. Hal itu karena pada umumnya program disusun berdasarkan usulan dari warga masyarakat yang terjaring melalui forum musyawarah baik di tingkat dusun

maupun desa. Hambatan atau kendala yang ditemukan dalam kajian barang dan jasa di desa ini adalah kesiapan para pihak untuk mengelola dana desa sangat penting karena akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang dikelola dengan baik, tidak adanya penyimpangan dana yang telah dianggarkan, akan meningkatkan efektifitas pemanfaatan dana desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu terjadinya percepatan pembangunan di desa.

## **3.2 Aplikasi Sistem Pelaporan Desa**

### **3.3.1 Input Data Harga Upah dan Bahan**

Harga upah dan bahan merupakan hal utama dalam menentukan hasil dari anggaran biaya, dikarenakan harga upah dan bahan digunakan dalam analisa konstruksi yang menggunakan harga upah dan bahan yang didapat dari nilai SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa) terbaru dari daerah tersebut. Contoh SHBJ dapat dilihat pada tabel berikut.

| DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN |                         |        |       |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------|
| NO.                                | URAIAN TENAGA           | SATUAN | HARGA |        |
| 1                                  | Tukang kayu             | hari   | Rp    | 55,000 |
| 2                                  | Kepala tukang kayu      | hari   | Rp    | 55,000 |
| 3                                  | Tukang batu             | hari   | Rp    | 50,000 |
| 4                                  | Kepala tukang batu      | hari   | Rp    | 50,000 |
| 5                                  | Tukang besi             | hari   | Rp    | 50,000 |
| 6                                  | Kepala tukang besi      | hari   | Rp    | 50,000 |
| 7                                  | Pekerja                 | hari   | Rp    | 40,000 |
| 8                                  | Mandor                  | hari   | Rp    | 45,000 |
| 9                                  | Sopir                   | hari   | Rp    | 65,000 |
| 10                                 | Masinis                 | hari   | Rp    | 65,000 |
| 11                                 | Kernet / pembantu sopir | hari   | Rp    | 40,000 |
| 12                                 | Mekanik terlatih        | hari   | Rp    | 65,000 |
| 13                                 | Operator tak terlatih   | hari   | Rp    | 45,000 |
| 14                                 | Operator terlatih       | hari   | Rp    | 65,000 |
| 15                                 | Operator semi terlatih  | hari   | Rp    | 46,000 |
| 16                                 | Juru godog aspal        | hari   | Rp    | 45,000 |
| 17                                 | Penjaga                 | hari   | Rp    | 40,000 |
| 18                                 | Penyemprot              | hari   | Rp    | 40,000 |
| 19                                 | Tukang aspal            | hari   | Rp    | 55,000 |

| DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN |   |                |                 |
|------------------------------------|---|----------------|-----------------|
| NO.                                | URAIAN BAHAN                                      | SAT            | HARGA           |
| 1                                  | Tipe segi empat holand 8 cm K 200                 | m <sup>2</sup> | Rp 66,000.00    |
| 2                                  | Kayu Meranti Balok                                | m <sup>3</sup> | Rp 3,750,000.00 |
| 3                                  | Kayu terentang                                    | m <sup>3</sup> | Rp 1,500,000.00 |
| 4                                  | Kayu bakar  | m <sup>3</sup> | Rp 100,000.00   |
| 5                                  | Kayu lapis mutu I AA 3 lapis uk. 122x244x0,9 cm   | lbr            | Rp 95,000.00    |
| 6                                  | Besi beton polos                                  | kg             | Rp 9,300.00     |
| 7                                  | Besi beton ulir                                   | kg             | Rp 9,800.00     |
| 8                                  | Kawat beton / bindrat                             | kg             | Rp 15,000.00    |
| 9                                  | Paku reng 55 x 3,1 mm                             | kg             | Rp 15,000.00    |
| 10                                 | Agregat halus/pasir klas A ( Uk. butir 5 mm )     | m <sup>3</sup> | Rp 90,000.00    |
| 11                                 | Agregat kasar/krikil/pasir klas B ( Uk. 20 - 40 ) | m <sup>3</sup> | Rp 190,000.00   |
| 12                                 | Batu pecah (split)                                | m <sup>3</sup> | Rp 190,000.00   |
| 13                                 | Batu pecah 15/20                                  | m <sup>3</sup> | Rp 90,000.00    |
| 14                                 | Batu pecah 5/7                                    | m <sup>3</sup> | Rp 120,000.00   |
| 15                                 | Batu pecah 3/4                                    | m <sup>3</sup> | Rp 140,000.00   |
| 16                                 | Batu pecah 2/3                                    | m <sup>3</sup> | Rp 170,000.00   |
| 17                                 | Batu pecah 1/2                                    | m <sup>3</sup> | Rp 190,000.00   |
| 18                                 | Batu Krikil Dia 10 mm                             | m <sup>3</sup> | Rp 210,000.00   |
| 19                                 | Pasir urug  | m <sup>3</sup> | Rp 53,000.00    |
| 20                                 | Pasir pasang                                      | m <sup>3</sup> | Rp 74,500.00    |
| 21                                 | Krikil beton biasa                                | m <sup>3</sup> | Rp 175,000.00   |
| 22                                 | Tanah urug  | m <sup>3</sup> | Rp 53,000.00    |
| 23                                 | Plastik pelapis beton                             | m <sup>2</sup> | Rp 1,000.00     |
| 24                                 | Aspal curah                                       | kg             | Rp 9,500.00     |
| 25                                 | Filler  | kg             | Rp 1,300.00     |
| 26                                 | Portland Cement (PC)                              | kg             | Rp 1,300.00     |
| 27                                 | Oli SAE 30  | ltr            | Rp 46,000.00    |
| 28                                 | Minyak bakar / kerosene                           | ltr            | Rp 9,600.00     |
| 29                                 | Bensin premium                                    | ltr            | Rp 10,300.00    |
| 30                                 | Solar   | ltr            | Rp 10,800.00    |
| 31                                 | Minyak pelumas                                    | ltr            | Rp 24,000.00    |
| 32                                 | Vet   | kg             | Rp 25,000.00    |
| 33                                 | Minyak bekisting                                  | ltr            | Rp 5,500.00     |
| 34                                 | HRS Prodok AMP                                    | ton            | Rp 1,100,000.00 |
| 35                                 | Sewa Cutter asphalt                               | hari           | Rp 150,000.00   |
| 36                                 | Sewa mobil pick up                                | hr             | Rp 225,000.00   |
| 37                                 | Sewa motor wals                                   | hr             | Rp 500,000.00   |

### 3.3.2 Analisa Harga Satuan Pekerjaan

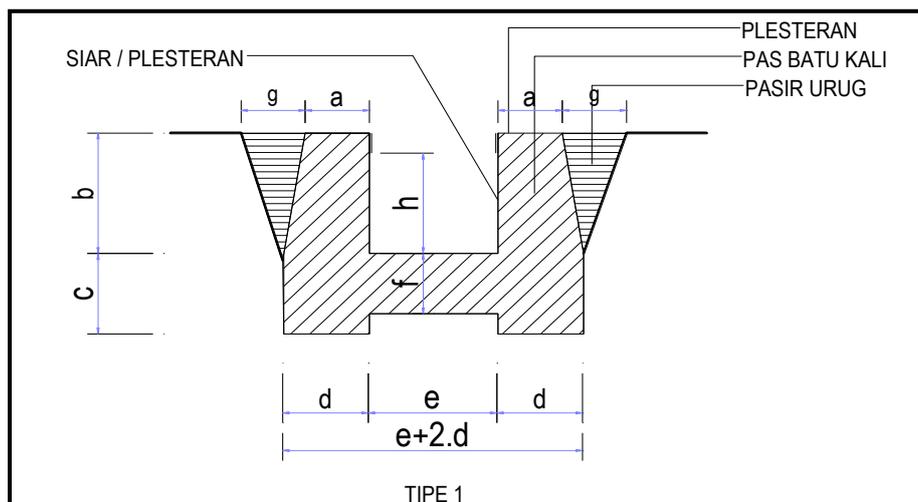
Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) merupakan perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. Harga satuan pekerjaan didapatkan dengan cara mengalikan harga upah atau harga barang dengan nilai koefisien suatu pekerjaan. Nilai koefisien didapat dari analisa metode SNI. Contoh AHSP untuk pekerjaan pondasi batu kali dapat dilihat pada tabel berikut:

| <b>ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI</b> |                          |    |   |       |           |            |            |                   |
|--|--------------------------|----|---|-------|-----------|------------|------------|-------------------|
| No.  | Macam Pekerjaan          |    |   |       | Upah      | Bahan      | Jumlah     |                   |
| (1)  | (2)                      |    |   |       | (3)       | (4)        | (5)        |                   |
|  | <b>PEKERJAAN PONDASI</b> |    |   |       |           |            |            |                   |
| 3  | 1.0000                   | m3 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 4 PP |       |           |            |            |                   |
|  | 1.2000                   | m3 | Batu belah 15 cm/20 cm                            | @ Rp. | 90,000.00 |            | 108,000.00 |                   |
|  | 163.0000                 | kg | Portland Cement                                   | @ Rp. | 1,300.00  |            | 211,900.00 |                   |
|  | 0.5200                   | m3 | Pasir Pasang                                      | @ Rp. | 74,500.00 |            | 38,740.00  |                   |
|  | 1.5000                   | oh | Pekerja   | @ Rp. | 40,000.00 | 60,000.00  |            |                   |
|  | 0.7500                   | oh | Tukang batu                                       | @ Rp. | 50,000.00 | 37,500.00  |            |                   |
| AK   | 0.0750                   | oh | Kepala tukang                                     | @ Rp. | 50,000.00 | 3,750.00   |            |                   |
|  | 0.0750                   | oh | Mandor  | @ Rp. | 45,000.00 | 3,375.00   |            |                   |
|  |                          |    | JUMLAH (BELUM PPN)                                |       |           | 104,625.00 | 358,640.00 | 463,265.00        |
|  |                          |    | JASA 10 %   |       |           |            |            | 46,326.50         |
|  |                          |    | JUMLAH  |       |           |            |            | 509,591.50        |
|  |                          |    | DIBULATKAN  |       |           |            |            | <b>509,591.00</b> |

Sehingga dari analisa diatas, perhitungan analisa harga satuan pekerjaan batu kali untuk 1 m<sup>3</sup> pekerjaan setelah ditambah PPn adalah seharga Rp. 509,519,00.

### 3.3.3 perhitungan volume

Aplikasi perhitungan pada kajian ini mengkaji beberapa jenis perhitungan volume, seperti : perhitungan volume saluran irigasi dengan berbagai tipe saluran, jalan desa, gorong-gorong dan pagar sederhana. Namun, contoh Perhitungan volume pada laporan kajian ini hanya akan mengambil satu contoh saluran irigasi dengan dimensi penampang saluran sebagai berikut :



Agar lebih memperjelas pengoperasian aplikasi, maka pada laporan ini akan mengambil sebuah contoh pekerjaan saluran irigasi dengan panjang saluran 100 meter dan dengan ukuran dimensi sebagai berikut :

$$a = 0.3 \text{ meter}$$

$$b = 0.6 \text{ meter}$$

$$c = 0.5 \text{ meter}$$

$$d = 0.4 \text{ meter}$$

$$e = 0.6 \text{ meter}$$

$$f = 0.3 \text{ meter}$$

$$g = 0.3 \text{ meter}$$

$$h = 0.5 \text{ meter}$$

Sehingga, perhitungan volume untuk pekerjaan saluran menjadi :

1. Galian Tanah Biasa :

$$a. 0.50 \times 0.40 \times 100 \times 2 = 40.00 \text{ m}^3$$

$$b. 0.30 \times 0.50 \times 100 = 15.00 \text{ m}^3$$

$$\text{Jumlah Galian biasa} = 55 \text{ m}^3$$

2. Galian tanah Keras

: - (tidak terdapat tanah keras pada galian)

3. Timbunan tanah:

$$a. (0.3 \times 0.6 / 2) \times 100 \times 2 = 12.00 \text{ m}^3$$

$$\text{Jumlah Timbunan Tanah} = 12.00 \text{ m}^3$$

4.Siar : - (tidak terdapat siar pada pekerjaan saluran karena saluran plesteran penuh)

5.Plesteran :

a.  $2.50 \times 100 = 250 \text{ m}^2$

**Jumlah Plesteran = 250 m<sup>2</sup>**

#### 6. Pasangan Batu Kali

a.  $0.3 \times 0.6 \times 100$  (lantai saluran) =  $18 \text{ m}^3$

b.  $0.5 \times 0.4 \times 100 \times 2$  (pondasi saluran) =  $40 \text{ m}^3$

c.  $(0.3 + 0.4) / 2 \times 0.6 \times 100 \times 2$  (dinding saluran) =  $42 \text{ m}^3$

#### Jumlah Volume Pasangan Batu

**= 100 m<sup>3</sup>**

Rekapitulasi perhitungan volume untuk pekerjaan saluran adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian  | Volume | Satuan         |
|-----|---|--------|----------------|
| 1   | Galian Tanah biasa sedalam 1 m                        | 58     | m <sup>3</sup> |
| 1   | Galian Tanah keras sedalam 1 m                        | -      | m <sup>3</sup> |
| 2   | Timbunan tanah atau urugan tanah kembali              | 18     | m <sup>3</sup> |
| 3   | Siaran dengan mortar tipe M ( 1PC 2PP )               | -      | m <sup>2</sup> |
| 4   | Plesteran tebal 1 cm dengan mortar tipe s ( 1PC 3PP ) | 250    | m <sup>2</sup> |
| 5   | Pasangan batu dengan mortar tipe N ( 1PC 4PP )        | 100    | m <sup>3</sup> |

#### 3.3.4 Rencana Anggaran Biaya

Setelah menghitung semua volume yang di butuhkan dalam pekerjaan saluran, maka rencana anggaran biaya untuk pekerjaan saluran dapat ditentukan sebagai berikut :

| No. Item Pemby. | Uraian Pekerjaan                                      | Satuan | No. An.   | Volume | Harga Satuan (Rp.)     | Jumlah Harga (Rp.)   |
|-----------------|---|--------|-----------|--------|------------------------|----------------------|
| <b>BAB. I</b>   | <b>Umum</b>   |        |           |        |                        |                      |
| 1.1             | <b>A. MOBILISASI</b>                                  |        |           |        |                        |                      |
|                 | - Pengukuran, pembersihan lokasi                      | Ls     | -         | 1.00   | 300,000.00             | 300,000.00           |
|                 | - Mobilisasi dan demobilisasi alat                    | Ls     | -         | 1.00   | 250,000.00             | 250,000.00           |
|                 | - Lansiran bahan/material                             | Ls     | -         | 1.00   | 1,250,000.00           | 1,250,000.00         |
|                 | - Dokumentasi/Laporan                                 | Ls     | -         | 1.00   | 1,000,000.00           | 1,000,000.00         |
|                 | - Sosialisasi   | Ls     | -         | 1.00   | 250,000.00             | 250,000.00           |
|                 | - Papan nama kegiatan                                 | Ls     | -         | 1.00   | 400,000.00             | 400,000.00           |
|                 |   |        |           |        | <b>Jumlah A</b>        | <b>3,450,000.00</b>  |
| <b>BAB. II</b>  | <b>Pekerjaan Tanah</b>                                |        |           |        |                        |                      |
| 2.1.            | Galian Tanah biasa sedalam 1 m                        | M3     | T.06a.1)  | 58.00  | 34,237.00              | 1,985,746.00         |
| 2.2.            | Galian Tanah keras sedalam 1 m                        | M3     | T.14a     | 0.00   | 34,237.00              | -                    |
| 2.3.            | Timbunan tanah atau urugan tanah kembali              | M3     | T.14a     | 18.00  | 28,350.00              | 510,300.00           |
|                 |   |        |           |        | <b>Jumlah I</b>        | <b>2,496,046.00</b>  |
| <b>BAB. III</b> | <b>Pekerjaan Struktur</b>                             |        |           |        |                        |                      |
| 3.1.            | Siaran dengan mortar tipe M ( IPC 2PP )               | M2     | P.03a     | 0.00   | 33,067.00              | -                    |
| 3.2.            | Plesteran tebal 1 cm dengan mortar tipe s ( IPC 3PP ) | M2     | P.04c     | 250.00 | 45,309.00              | 11,327,250.00        |
| 3.3.            | Pasangan batu dengan mortar tipe N ( IPC 4PP )        | M3     | P.01.c.2) | 100.00 | 509,591.00             | 50,959,100.00        |
|                 |   |        |           |        | <b>Jumlah II</b>       | <b>62,286,350.00</b> |
|                 |   |        |           |        | <b>JUMLAH B (I+II)</b> | <b>64,782,396.00</b> |
|                 |   |        |           |        | <b>Jumlah (A+B)</b>    | 68,232,396.00        |
|                 |   |        |           |        | <b>PPN 10 %</b>        | 6,823,239.60         |
|                 |   |        |           |        | <b>Jumlah Total</b>    | <b>75,055,635.60</b> |
|                 |   |        |           |        | <b>Dibulatkan</b>      | <b>75,055,000.00</b> |

Rencana anggaran biaya didapat dari jumlah perkalian antara volume setiap pekerjaan dengan harga satuan setiap pekerjaan. Sehingga, Rencana anggaran biaya pekerjaan saluran irigasi tipe 1 dengan panjang saluran 100 meter adalah sebesar Rp. 75.055.000,00 rupiah.

### 3.3 Progres Pekerjaan Konstruksi

Progress pekerjaan adalah pekerjaan konstruksi yang sudah dikerjakan oleh penyedia/rekanan sesuai dengan gambar dan rencana kerja dan syarat yang telah disepakati pada kontrak. Progress pekerjaan dapat diketahui dengan melihat volume pekerjaan yang dicapai dengan volume total pekerjaan. Progress pekerjaan konstruksi diperlukan untuk mengaudit suatu pekerjaan konstruksi yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan atau keterlambatan suatu pekerjaan, sehingga dengan mengetahui deviasi suatu progress pekerjaan apabila terjadi kendala pada suatu pekerjaan tersebut dapat segera terselesaikan.

Progress pengadaan pekerjaan konstruksi dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi item pekerjaan yang sudah berjalan di lapangan misalkan pekerjaan tanah atau pekerjaan struktur
2. Uraikan dalam sub item pekerjaan apa saja. Misalkan pekerjaan struktur terdapat sub pasangan batu, plesteran dan siar.
3. Hitung volume sub pekerjaan misalkan pekerjaan pasangan batu yang sudah terpasang pada volume sebesar 80 m<sup>2</sup>, plesteran yang sudah dikerjakan 10 m<sup>2</sup> dan sebagainya.
4. Hasil volume yang sudah dikerjakan tersebut kemudian dibagi dengan volume pekerjaan total dikali 100%.
5. Volume yang sudah dihitung dikalikan dengan harga upah per satuan
6. Lakukan hal yang sama dengan sub-sub pekerjaan lain.

Berikut ini contoh menghitung progres pekerjaan proyek dengan sederhana:

$$\text{Progress} = (\text{volume yang sudah dikerjakan} / \text{volume total pekerjaan}) \times 100\%$$

80 m<sup>3</sup> dari volume total pasangan batu 100 m<sup>3</sup>, plesteran yang sudah dikerjakan 10 m<sup>2</sup> dari total volume plesteran 250 m<sup>2</sup>. Sehingga progress untuk pekerjaan strukturnya adalah :

#### **Persentase struktur**

$$\text{Pekerjaan pasangan batu} = 80/100 \times 100 \% = 80 \%$$

$$\text{Pekerjaan plesteran} = 10/250 \times 100 \% = 2.8 \%$$

dengan mengetahui presentase yang telah tercapai, maka dapat mengetahui besarnya biaya yang di keluarkan. Berikut ini contoh perhitungan biaya pada presentase progress yang telah tercapai :

### Contoh Perhitungan biaya

|               |                          |                            |
|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Pasangan batu | = 80 % x Rp 50,959,100   | = Rp. 40,767,280.00        |
| Plesteran     | = 2.8 % x Rp. 11,327,250 | = Rp. 317,163.00           |
| <b>Total</b>  |                          | <b>= Rp. 41,084,443.00</b> |

Perhitungan biaya bermanfaat untuk mengaudit anggaran yang telah dikeluarkan sehingga besarnya biaya yang telah terpakai dapat diketahui, sehingga hal ini dapat meminimalisasi kebocoran anggaran dalam suatu pekerjaan.

Progress pekerjaan merupakan capaian Monitoring atau pengecekan suatu pekerjaan dilakukan secara berkala, yaitu harian, mingguan ataupun bulanan. Hal ini penting sekali untuk dilaporkan karena apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan ataukah tidak.

Bagi sebagian besar auditor yang berlatar belakang pendidikan non-teknik akan menemui kesulitan apabila dihadapkan pada perhitungan teknik (cara menghitung progres), sementara perhitungan teknik harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres pekerjaan proyek tersebut, sehingga pada kajian ini dengan bantuan program komputer dapat membuat pelaporan mingguan atau bulanan dengan cara yang relatif lebih mudah dan singkat.

### 3.4 Menghitung Kebutuhan Material dan Pekerja

kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan pada setiap pekerjaan sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya adalah jenis pekerjaan, kerumitan pekerjaan, resiko dan volume pekerjaan. Dalam contoh pekerjaan dikajian ini kebutuhan material dan tenaga dihitung dengan bantuan analisa metode SNI, yaitu dengan mengalikan koefisien di setiap pekerjaan dengan jumlah volume pekerjaan. Perhitungan kebutuhan material dan pekerja yang sesuai dapat dijadikan acuan guna mengontrol pekerjaan agar terjadi kesesuaian antara pekerjaan dilapangan dengan dana anggaran yang dikeluarkan.

Contoh perhitungan :

Saluran irigasi tipe 1 (seperti contoh diatas) dengan panjang saluran 100 meter dengan volume pasangan batu  $100 \text{ m}^3$ , berapakah kebutuhan material (batu, pasir dan semen) untuk pekerjaan pasangan batu tersebut?

Maka, hal ini dapat di tentukan dengan mengalikan koefisien pasangan batu (1,2) dengan volume pasangan batu total ( $100 \text{ m}^3$ ), sehingga dibutuhkan kebutuhan batu sekitar  $120 \text{ m}^3$ .

Jika ditabelkan kebutuhan pekerjaan pasangan batu dapat disajikan sebagai berikut :

| JENIS         | KOEFISIEN | VOLUME            | KEBUTUHAN                   |
|---------------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| Batu          | 1.2       | $100 \text{ m}^3$ | $120 \text{ m}^3$           |
| Pasir         | 0.52      | $100 \text{ m}^3$ | $52 \text{ m}^3$            |
| Semen         | 163       | $100 \text{ m}^3$ | 16300 kg = 407.5 zak (40kg) |
| Pekerja       | 2.7       | $100 \text{ m}^3$ | 270 OH                      |
| Tukang        | 0.9       | $100 \text{ m}^3$ | 90 OH                       |
| Kepala Tukang | 0.09      | $100 \text{ m}^3$ | 9 OH                        |
| Mandor        | 0.27      | $100 \text{ m}^3$ | 27 OH                       |

Sehingga, dengan mengetahui kebutuhan biaya untuk tenaga kerja, bahan dan peralatan pada setiap pekerjaan, akan membantu tugas dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dalam proses pengadaan yaitu pada proses penyusunan RAB dan melakukan negosiasi harga.

### 3.5 Tutorial Penggunaan Program Excel

Tutorial untuk menjalankan penggunaan program excel dalam perhitungan ini dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan sebagai berikut ini :

Pengisian sesuai tipe link ke back up volume (INPUTING DATA HANYA SHEET WARNA MERAH)

| Ukuran Penampang :                 | Simbol        | Value | Material       |
|------------------------------------|---------------|-------|----------------|
|                                    | a             | 0,45  | Plester Kepala |
|                                    | b             | 0,30  | m              |
|                                    | c             | 0,60  | m              |
|                                    | c tanah keras | 0,40  | m              |
|                                    | d             | 0,40  | m              |
|                                    | d tanah keras | 0,50  | m              |
|                                    | e             | 0,50  | m              |
|                                    | e tanah keras | 0,30  | m              |
|                                    | f             | 0,10  | m              |
|                                    | g             | 0,50  | m              |
|                                    | h Siar        | 10    | m              |
|                                    | h Plesteran   |       | m              |
| Panjang Lining Kanan kiri + Lantai |               |       |                |

Pengisian Dimensi Sesuai Tipe saluran, di input Sesuai Huruf Pada Gambar (Back Up Masuk Print Out Put)

| Ukuran Penampang :                 | Simbol        | Value | Material |
|------------------------------------|---------------|-------|----------|
|                                    | a             | 0,00  | m        |
|                                    | b             | 0,00  | m        |
|                                    | c             | 0,00  | m        |
|                                    | c tanah keras | 0,00  | m        |
|                                    | d             | 0,00  | m        |
|                                    | d tanah keras | 0,00  | m        |
|                                    | e             | 0,00  | m        |
|                                    | e tanah keras | 0,00  | m        |
|                                    | f             | 0,00  | m        |
|                                    | g             | 0,00  | m        |
|                                    | h Siar        | 0,00  | m        |
|                                    | h Plesteran   | 0,00  | m        |
| Panjang Lining Kanan kiri + Lantai |               |       |          |



C

1) Laporan H, M, BL, Infrastruktur Desa AKHIR.xlsx - Excel

Input data bahan masuk An Konstruksi (hasil ini masuk print input put)

| NO. | URAIAN BAHAN                                      | SAT            | HARGA           |
|-----|---|----------------|-----------------|
| 1   | Tipe segi empat holand 8 cm K 200                 | m <sup>2</sup> | Rp 66.000,00    |
| 2   | Kayu Meranti Balok                                | m <sup>3</sup> | Rp 3.750.000,00 |
| 3   | Kayu terentang                                    | m <sup>3</sup> | Rp 1.500.000,00 |
| 4   | Kayu bakar  | m <sup>3</sup> | Rp 100.000,00   |
| 5   | Kayu lapis mutu I AA 3 lapis uk. 122x244x0,9 cm   | m <sup>3</sup> | Rp 95.000,00    |
| 6   | Besi beton polos                                  | kg             | Rp 9.300,00     |
| 7   | Besi beton ulir                                   | kg             | Rp 9.800,00     |
| 8   | Kawat beton / bindrat                             | kg             | Rp 15.000,00    |
| 9   | Paku reng 55 x 3,1 mm                             | kg             | Rp 15.000,00    |
| 10  | Agregat halus/pasir klas A ( Uk. butir 5 mm )     | m <sup>3</sup> | Rp 90.000,00    |
| 11  | Agregat kasar/krikil/pasir klas B ( Uk. 20 - 40 ) | m <sup>3</sup> | Rp 190.000,00   |
| 12  | Batu pecah (split)                                | m <sup>3</sup> | Rp 190.000,00   |
| 13  | Batu pecah 15/20                                  | m <sup>3</sup> | Rp 90.000,00    |
| 14  | Batu pecah 5/7                                    | m <sup>3</sup> | Rp 120.000,00   |
| 15  | Batu pecah 3/4                                    | m <sup>3</sup> | Rp 140.000,00   |
| 16  | Batu pecah 2/3                                    | m <sup>3</sup> | Rp 170.000,00   |
| 17  | Batu pecah 1/2                                    | m <sup>3</sup> | Rp 190.000,00   |

71.000,00  
10,64

PEKERJAAN PONDASI  
Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 4 PP

| No. | Uraian                 | Satuan | Volume     | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|------------------------|--------|------------|-------------------|-------------|
| 1   | Batu belah 15 cm/20 cm | @ Rp   | 90.000,00  |                   | 108.000,00  |
| 2   | Portland Cement        | @ Rp   | 1.300,00   |                   | 211.900,00  |
| 3   | Pasir Pasang           | @ Rp   | 74.500,00  |                   | 38.740,00   |
| 4   | Pekerja                | @ Rp   | 40.000,00  |                   | 60.000,00   |
| 5   | Tukang batu            | @ Rp   | 50.000,00  |                   | 75.000,00   |
| 6   | Kepala tukang          | @ Rp   | 3.750,00   |                   | 5.000,00    |
| 7   | Mandor                 | @ Rp   | 45.000,00  |                   | 3.750,00    |
| 8   | Jumlah ( BELUM PPN )   |        | 104.625,00 |                   | 358.640,00  |
| 9   | JASA 10 %              |        |            |                   | 46.326,50   |
| 10  | Jumlah                 |        |            |                   | 509.591,50  |
| 11  | DIBULATKAN             |        |            |                   | 509.591,00  |

PEKERJAAN BETON  
Membuat beton mutu Fc = 19,3 MPa (K 225), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58

| No. | Uraian                | Satuan | Volume     | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|-----------------------|--------|------------|-------------------|-------------|
| 1   | Portland Cement       | @ Rp   | 1.300,00   |                   | 482.300,00  |
| 2   | Pasir beton           | @ Rp   | 74.500,00  |                   | 37.145,70   |
| 3   | Kerikil beton (split) | @ Rp   | 190.000,00 |                   | 142.092,86  |
| 4   | Pekerja               | @ Rp   | 40.000,00  |                   | 66.000,00   |
| 5   | Tukang batu           | @ Rp   | 50.000,00  |                   | 13.750,00   |
| 6   | Kepala tukang         | @ Rp   | 50.000,00  |                   | 1.400,00    |
| 7   | Jumlah ( BELUM PPN )  |        | 420.000,00 |                   | 828.690,56  |
| 8   | JASA 10 %             |        |            |                   | 82.869,06   |
| 9   | Jumlah                |        |            |                   | 911.559,62  |
| 10  | DIBULATKAN            |        |            |                   | 911.559,00  |

Page 1

INPUT DATA | Uphah | Bahan | An\_Konstruksi | An\_KPUI | back up Volume | Yekap Back Up | RAB FISIK | T.Schedule | Data

1) Laporan H, M, BL, Infrastruktur Desa AKHIR.xlsx - Excel

data an kontruksi masuk RAB fisik "harga satuan" (hasil RAB fisik masuk print Out put)

| No. | Uraian                 | Satuan | Volume     | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|------------------------|--------|------------|-------------------|-------------|
| 1   | Batu belah 15 cm/20 cm | @ Rp   | 90.000,00  |                   | 108.000,00  |
| 2   | Portland Cement        | @ Rp   | 1.300,00   |                   | 211.900,00  |
| 3   | Pasir Pasang           | @ Rp   | 74.500,00  |                   | 38.740,00   |
| 4   | Pekerja                | @ Rp   | 40.000,00  |                   | 60.000,00   |
| 5   | Tukang batu            | @ Rp   | 50.000,00  |                   | 75.000,00   |
| 6   | Kepala tukang          | @ Rp   | 3.750,00   |                   | 5.000,00    |
| 7   | Mandor                 | @ Rp   | 45.000,00  |                   | 3.750,00    |
| 8   | Jumlah ( BELUM PPN )   |        | 104.625,00 |                   | 358.640,00  |
| 9   | JASA 10 %              |        |            |                   | 46.326,50   |
| 10  | Jumlah                 |        |            |                   | 509.591,50  |
| 11  | DIBULATKAN             |        |            |                   | 509.591,00  |

PEKERJAAN SALURAN  
SALURAN KULON DESO  
Wakirsari, Cangkringan, Sleman

| No. | Uraian                           | Satuan | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)  |
|-----|----------------------------------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 1   | Pengukuran, pembarahan lokasi    | Ls     | 1,00   | 300.000,00        | 300.000,00   |
| 2   | Mobilisasi dan demobilisasi alat | Ls     | -      | 250.000,00        | 250.000,00   |
| 3   | Penyediaan bahan material        | Ls     | -      | 1.250.000,00      | 1.250.000,00 |
| 4   | Dokumentasi Laporan              | Ls     | -      | 1.000.000,00      | 1.000.000,00 |
| 5   | Sosialisasi                      | Ls     | -      | 250.000,00        | 250.000,00   |
| 6   | Paparan nama kegiatan            | Ls     | -      | 400.000,00        | 400.000,00   |
| 7   | Jumlah A                         |        |        |                   | 3.450.000,00 |

PEKERJAAN TANAH

| No. | Uraian                                   | Satuan | Volume   | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)  |
|-----|--|--------|----------|-------------------|--------------|
| 1   | Galian Tanah biasa sedalam 1 m           | M3     | T.06a.1) | 30,00             | 34.237,00    |
| 2   | Galian Tanah keras sedalam 1 m           | M3     | T.14a    | 30,00             | 1.027.110,00 |
| 3   | Timbunan tanah atas urugan tanah kembali | M3     | T.14a    | 10,00             | 28.350,00    |
| 4   | Jumlah I                                 |        |          |                   | 2.337.720,00 |

PEKERJAAN STRUKTUR

| No. | Uraian  | Satuan | Volume    | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp)   |
|-----|---|--------|-----------|-------------------|---------------|
| 1   | Siaran dengan mortar tipe M ( 1PC 2PP )               | M2     | P.03a     | 220,00            | 33.067,00     |
| 2   | Plintiran tebal 1 cm dengan mortar tipe x ( 1PC 3PP ) | M2     | P.04c     | 60,00             | 45.309,00     |
| 3   | Pasangan batu dengan mortar tipe N ( 1PC 4PP )        | M3     | P.01.c.2) | 130,00            | 509.591,00    |
| 4   | Jumlah II   |        |           |                   | 76.246.119,00 |

Page 1

INPUT DATA | Uphah | Bahan | An\_Konstruksi | An\_KPUI | back up Volume | Yekap Back Up | RAB FISIK | T.Schedule | Data



T. schedule hasil input RAB fisik "Volume" (T. schedule masuk print Out put)

| No. | Uraian Pekerjaan  | Volume | Satuan | Tahun Anggaran 2019 |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
|-----|---|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
|     |   |        |        | 1                   | 2     | 3     | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 18  | BAB I Umum  |        |        |                     |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 19  | A. MOBILISASI   |        |        |                     |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 20  | Pengukuran, pembersihan lokasi                          | 1,00   | Ls     | 0,36                | 0,061 | 0,061 | 0,061 |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 21  | Mobilisasi dan demobilisasi alat                        | 1,00   | Ls     | 0,95                | 0,061 | 0,061 |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 22  | Lansiran bahan/material                                 | 1,00   | Ls     | 1,54                | 0,381 | 0,381 | 0,381 |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 23  | Dokumentasi/Laporan                                     | 1,00   | Ls     | 1,29                | 0,15  | 0,15  | 0,15  |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 24  | Sosialisasi   | 1,00   | Ls     | 0,36                | 0,061 | 0,061 |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 25  | Papan nama kegiatan                                     | 1,00   | Ls     | 0,488               |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 26  | Jumlah  |        |        |                     |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 27  | BAB II Pekerjaan Tanah                                  |        |        |                     |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 28  | 2.1 Galian Tanah biasa sedalam 1 m                      | 30,00  | m3     |                     |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 29  | 2.2 Galian Tanah keras sedalam 1 m                      | 30,00  | m3     |                     |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 30  | 2.3 Timbunan tanah atau urugan tanah kembali            | 30,00  | m3     | 0,345               |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 31  | BAB III Pekerjaan Struktur                              |        |        |                     |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 32  | 3.1 Saran dengan mortar tipe M (IPC 2PP)                | 220,00 | m2     | 8,869               |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 33  | 3.2 Plesteran tebal 1 cm dengan mortar tipe s (IPC 3PP) | 60,00  | m2     | 3,394               |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 34  | 3.3 Pasangan batu dengan mortar tipe N (IPC 4PP)        | 130,00 | m3     | 60,761              |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 35  | Jumlah  |        |        | 100,000             |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 36  | Rencana Kemajuan Mingguan dalam %                       |        |        | 0,196               | 1,479 |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 37  | Rencana Kumulatif Kemajuan dalam %                      |        |        | 0,196               | 1,675 |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 38  | Realisasi Kemajuan Mingguan dalam %                     |        |        |                     |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 39  | Realisasi Kumulatif Kemajuan dalam %                    |        |        |                     |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 40  | Deviasi (+/-)   |        |        |                     |       |       |       |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |

Draf laporan mingguan hasil input RAB fisik "Volume dan harga satuan" (draf tidak masuk print Out put)

| No. | Uraian Kegiatan   | Sat | Harga Sat    | Volume | Kontrak       | MC 0 balasan |
|-----|---|-----|--------------|--------|---------------|--------------|
| 10  | BAB I Pekerjaan Persiapan                               |     |              |        |               |              |
| 11  | A. MOBILISASI   |     |              |        |               |              |
| 12  | 1.1 Pengukuran, pembersihan lokasi                      | ls  | 300.000,00   | 1,00   | 300.000,00    | 1,00         |
| 13  | 1.2 Mobilisasi dan demobilisasi alat                    | ls  | 250.000,00   | 1,00   | 250.000,00    | 1,00         |
| 14  | 1.3 Lansiran bahan/material                             | ls  | 1.250.000,00 | 1,00   | 1.250.000,00  | 1,00         |
| 15  | 1.4 Dokumentasi/Laporan                                 | ls  | 1.000.000,00 | 1,00   | 1.000.000,00  | 1,00         |
| 16  | 1.5 Sosialisasi   | ls  | 250.000,00   | 1,00   | 250.000,00    | 1,00         |
| 17  | 1.6 Papan nama kegiatan                                 | ls  | 400.000,00   | 1,00   | 400.000,00    | 1,00         |
| 18  | Jumlah  |     |              |        |               |              |
| 19  | BAB II Pekerjaan Tanah                                  |     |              |        |               |              |
| 20  | 2.1 Galian Tanah biasa sedalam 1 m                      | m3  | 34.237,00    | 30,00  | 1.027.110,00  | 30,00        |
| 21  | 2.2 Galian Tanah keras sedalam 1 m                      | m3  | 34.237,00    | 30,00  | 1.027.110,00  | 30,00        |
| 22  | 2.3 Timbunan tanah atau urugan tanah kembali            | m3  | 29.350,00    | 10,00  | 293.500,00    | 10,00        |
| 23  | Jumlah  |     |              |        |               |              |
| 24  | BAB III Pekerjaan Struktur                              |     |              |        |               |              |
| 25  | 3.1 Saran dengan mortar tipe M (IPC 2PP)                | m2  | 33.067,00    | 220,00 | 7.274.740,00  | 220,00       |
| 26  | 3.2 Plesteran tebal 1 cm dengan mortar tipe s (IPC 3PP) | m2  | 45.309,00    | 60,00  | 2.718.540,00  | 60,00        |
| 27  | 3.3 Pasangan batu dengan mortar tipe N (IPC 4PP)        | m3  | 509.591,00   | 130,00 | 66.246.830,00 | 130,00       |
| 28  | Jumlah  |     |              |        |               |              |
| 29  | 8.027.830,00  |     |              |        |               |              |
| 30  | 8.202.783,00  |     |              |        |               |              |
| 31  | 90.230.613,00   |     |              |        |               |              |
| 32  | 90.230.000,00   |     |              |        |               |              |
| 33  |   |     |              |        |               |              |
| 34  |   |     |              |        |               |              |
| 35  |   |     |              |        |               |              |
| 36  |   |     |              |        |               |              |

1.) Laporan H. M. BL, Infrastruktur Desa AKHIR.xlsm - Excel

data hasil input data administrasi  
(data tidak masuk print Out put)

SECURITY WARNING: Automatic update of links has been disabled. Enable Content

C37 : \*KEPALA DESA

|    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

LM Laporan Mingguan  
LB Laporan Bulanan  
LH Laporan Harian

INPUT DATA | Upah | Bahan | An\_Konstruksi | An\_KPUT | back up Volume | rekap Back Up | RAB FISIK | T.Schedule | Data | Draft Laporan Mingguan | LB1 | LB2 | LM

READY | Type here to search | 12:04 | 16/11/2019

Laporan mingguan (LM 1..dst) hasil input dari Draf Laporan mingguan (LM 1..dst) masuk print Out put

**LAPORAN MINGGUAN**

| NO | URAIAN                           | SAT | VOLUME KONTRAK | BODOT | PROGRES MINGGUAN | PROGRES 30 MINGGUAN | KETERANGAN |
|----|----------------------------------|-----|----------------|-------|------------------|---------------------|------------|
| 11 | A. Mobilisasi                    | Ls  | 100            | 0,97  | 0,50             | 0,18                | 0,50       |
| 12 | Pengukuran, pembarisan lokasi    | Ls  | 100            | 1,00  | 1,00             | 1,00                | 1,00       |
| 13 | Mobilisasi dan demobilisasi alat | Ls  | 100            | 1,00  | 1,00             | 1,00                | 1,00       |
| 14 | Layanan bahan material           | Ls  | 100            | 1,00  | 1,00             | 1,00                | 1,00       |
| 15 | Dokumentasi laporan              | Ls  | 100            | 0,30  | 0,14             | 0,17                | 0,14       |
| 16 | Sosialisasi                      | Ls  | 100            | 0,30  | 0,30             | 0,30                | 0,30       |
| 17 | Persiapan tenaga keahliannya     | Ls  | 100            | 0,45  | 0,45             | 0,45                | 0,45       |

Laporan Harian (LH 1..dst) hasil input dari Draf Laporan Mingguan (LH 1..dst) masuk print Out put

**LAPORAN HARIAN**

| No | Nama Bahan/Material | Satuan | Bahan masuk | Bahan digunakan |
|----|---------------------|--------|-------------|-----------------|
| 1  | Semen               | 2tk    | 900,00      | 900,00          |
| 2  | Pasir Pasang        | m3     | 30,00       | 30,00           |
| 3  | Batu Kali           | m3     | 20,00       | 20,00           |
| 4  | Paku                | kg     | 20,00       | 20,00           |
| 5  | Urea 45             | kg     | 20,00       | 20,00           |
| 6  | Kawat Besi          | kg     | 20,00       | 20,00           |
| 7  | Benang              | kg     | 20,00       | 20,00           |

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil kajian dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut :

1. Pertama, Kesiapan para pihak untuk mengelola dana desa sangat penting karena akan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
2. Kedua, dalam penggunaan Dana Desa perlu ada penambahan porsi anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa. Hal itu diperlukan agar program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bisa lebih bermanfaat bagi warga masyarakat.
3. Ketiga, perlu ada upaya untuk menjamin ketepatan waktu pelaksanaan transfer Dana Desa ke pemerintah desa. Ketepatan waktu penyaluran dana desa akan menyebabkan pemerintah desa memiliki waktu yang cukup untuk mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
4. Keempat, perlu ada penyederhanaan sistem pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa tanpa mengurangi akuntabilitas laporan, sehingga memudahkan pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban.
5. Dari segi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban beberapa Desa belum sepenuhnya mentaatinya, dimana laporan pertanggungjawaban akhir

realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati dan laporan akhir pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum dilakukan sesuai dengan standar yang digunakan.

6. peluang terjadinya penyelewengan anggaran di desa lantaran lemahnya pengawasan dari semua pihak baik itu masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum. sehingga, pemerintah daerah wajib meningkatkan SDM aparatur desa, intensif melakukan pembinaan dan pengawasan. Karena dapat menjadi celah utama terjadinya penyelewengan anggaran,
7. Lemahnya kemampuan pemerintah Desa dalam mengurus administrasi pemerintahan dan tidak adanya sanksi serta belum optimalnya lembaga pengawas menjadi penyebab kegagalan pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan pengembangan kapasitas dan pendampingan kepada perangkat pemerintahan desa untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan terus mengawasi perkembangan pemerintahan desa dapat menjadi sumber masukan untuk perbaikan pemerintahan desa.

#### **4.2. Saran**

1. Pemerintah desa lebih meningkatkan kesiapan dalam pengelolaan anggaran dana desa, sehingga dapat meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan dilingkup desa dengan mengelola anggaran dana desa dengan baik.

2. Masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan.
3. Melakukan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sehingga tercipta masyarakat yang memiliki SDM yang mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Aplikasi program komputer pada kajian ini hanya dapat dioperasikan menghitung pekerjaan saluran irigasi, jalan desa, gorong-gorong dan pagar sederhana. Sehingga diperlukan penelitian serupa yang dilakukan untuk menambah variasi pekerjaan yang lain seperti gedung sederhana, jembatan dan lain sebagainya.
5. Metode analisa harga satuan yang digunakan pada kajian ini adalah menggunakan analisa SNI, diperlukannya sebuah kajian jika menggunakan analisa selain analisa SNI untuk mengetahui analisa yang paling mewakili keadaan pekerjaan desa yang sebenarnya.
6. Aplikasi ini dapat digunakan secara mudah dan sederhana, dapat digunakan berlatar belakang teknik maupun non-teknik. Namun, tetap diperlukannya pendamping teknis yang memahami bidang teknik sipil agar dapat meminimalisasi kesalahan dalam input data dan dapat melakukan koreksi hasil output yang dihasilkan.